



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 4 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PANGAN NASIONAL
UNIT KERJA : DEPUTI BIDANG KETERSEDIAAN DAN STABILITASI PANGAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : I GUSTI KETUT ASTAWA
2. Jabatan : DEPUTI
3. NHK : 223209

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	3.650.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 96 m2/100 m2 di KAB / KOTA BANDUNG BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 650.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m2/21 m2 di KAB / KOTA BANDUNG BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000		
3. Tanah dan Bangunan Seluas 108 m2/50 m2 di KAB / KOTA BANDUNG BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000		
4. Tanah dan Bangunan Seluas 126 m2/50 m2 di KAB / KOTA BANDUNG BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 1.250.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	717.000.000
1. MOBIL, HONDA BRIO RS 1.2 CVT Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000		
2. MOTOR, HONDA H1B02N42LO A/T (SOLO) Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 17.000.000		
3. MOBIL, HONDA SEDAN/CIVIC Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	309.050.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	3.561.675.800
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	8.237.725.800



III. HUTANG

Rp. 489.682.424

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 7.748.043.376

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.